



Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD dalam Mewujudkan Efektivitas Pengeluaran Anggaran SKPD Kabupaten Garut

Santi Susanti

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Garut

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD dalam mewujudkan efektivitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X), Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) dan efektivitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z). Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif analisis, hasil analisis bahwa Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah menunjukkan pada kriteria cukup baik, Pengelolaan Keuangan SKPD dikategorikan baik dan Efektivitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut menunjukkan pada kriteria baik. Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan SKPD dan Efektivitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut.

Kata Kunci: Kebijakan, Manajemen, Efektivitas

1. Pendahuluan

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka pemerintah terus melakukan upaya dan tindakan dalam penyelenggaraan negara di era reformasi (Kamasan et al., 2019). Pada bidang keuangan khususnya pemerintah terus berupaya untuk menata sistem pengelolaan keuangan negara, secara konkret.

Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dapat menggambarkan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri sumber-sumber penerimaan daerah yang ada di dalam PAD (Surbakti, 2011). Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-

daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan yang harus dikelola dengan .

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Garut dalam manajemen pengelolaan keuangan SKPD pencapaian realisasi hanya 98,97% dari anggaran yang telah di tetapkan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa anggaran belanja pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.528.926.876.090,17,-. yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.422.978.254.586,00,- yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain yang Sah, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 132.643.759.482,00-

Dari penjelasan di atas bahwa berimbas kepada pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut masih kurang efektifif dan di nilai masih lemahnya, hal ini dapat dilihat dari problematika pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam sistem pengawasan dan pengendaliannya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara dan pada pengelolaan keuangan belum adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pembendahaarn keuangan Daerah masih kurang optimal salah satunya adalah rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran keuangan publik. Dalam penelitian ini implementasi kebijakan diukur dengan menggunakan beberapa dimensi yaitu: 1) Standar dan Sasaran Kebijakan. 2) Sumberdaya. 3) Karakteristik Organisasi. 4) Disposisi Impementor. Dan 5) Karakteristik agen pelaksana Kebijakan (Metter & Horn, 1975).

Dalam teori manajemen pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan dalam manajemen Pengelolaan Keuangan menurut (Stoner & Freeman, 2012) adalah sebaga berikut: 1) Perencanaan. 2) Pengorganisasian. 3) Pengarahan. 4) Pengkoordinasian. 5) Pelaporan. Dan 6) Penganggaran Pengelolaan.

Sedangkan kaitannya dengan Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan, menurut (Tyson & Jackson, 2010) meliputi: 1) Pencapaian. 2) Delegasi 3) Pertanggungjawaban, 4) Pengendalian. 5) Koordinasi. 6) Efisiensi. 7) Adaptasi dan 8) Sistem sosial dan harapan seseorang.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hubungan kausalitas antara konsep dan variabel dalam penelitian ini sangat jelas bahwa Kebijakan pembendaharaan Keuangan Daerah akan berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan keuangan SKPD dalam mewujudkan efektivitas pengeluaran anggaran SKPD di Kabupaten Garut.

2. Metodologi

Desain penelitian menggunakan Survey deskriptif analisis, variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas X (Kebijakan pembendaharaan Keuangan Daerah), variabel antara Y (manajemen pengelolaan keuangan SKPD), dan variabel terikat Z (efektivitas pengeluaran anggaran SKPD). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh petugas pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut sebanyak 75 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2002) yang mengatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus.

Pengumpulan datanya dengan cara: studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari : Observasi, Wawancara, dan Angket sedangkan Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas Uji dan Reliabilitas serta Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Statistik

Tabel 1 Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi
1.	Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (Metter & Horn, 1975)	Standar dan Sasaran Kebijakan Sumberdaya Karakteristik Organisasi Disposisi Impementor Karakteristik agen pelaksana Pembendaharaan Keuangan Daerah
2	Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Stoner & Freeman, 2012)	Perencanaan Pengelolaan Keuangan SKPD Pengorganisasian Pengelolaan Keuangan SKPD Pengarahan Pengkoordinasian Pengelolaan Keuangan SKPD Pelaporan Panganggaran Pengelolaan Keuangan SKPD
3.	Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Tyson & Jackson, 2010)	Pencapaian Delegasi Pertanggungjawaban Pengendalian Koordinasi Efisiensi Adaptasi Sistem sosial

3. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pengujian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah yang ditunjukkan melalui indikator sebanyak 15 item memberikan pengaruh nyata terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut. Keberpengaruhannya ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 5,8246 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z). Adapun besaran nilai koefisien determinasi (R^2_{YZX}) sebesar 0,8503. Hal ini menunjukkan bahwa 72,29% Manajemen Pengelolaan Keuangan

SKPD (Y) dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z) mampu dijelaskan oleh variabel Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X), sedangkan 27,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Artinya bahwa Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah sangat besar pengaruhnya terhadap manajemen pengelolaan keuangan SKPD dan efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut karena dengan kebijakan yang baik dan dapat di implemmentasikan maka akan tercapai apa yang menjadi tujuan organisasi. Analisis penulis yang dapat mempengaruhi terhadap manajemen pengelolaan Keuangan SKPD dan efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut diantaranya adalah profesionalme dan kompetensi dari pegawai.

Secara empirik, hasil pengujian di atas menggambarkan bahwa paradigma Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD yang dilandasi Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah relatif telah berjalan dengan baik, khususnya dalam Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut. Analisis penulis bahwa pengaruh lain yang dapat mempengaruhi terhadap manajemen pengelolaan Keuangan SKPD dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut diantaranya adalah profesionalime pegawai.

Hasil pengujian di atas mengindikasikan bahwa telah berjalan relatif baik Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah yang memberikan pengaruh terhadap manajemen pengelolaan Keuangan SKPD dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut. Hal ini menunjukkan bahwa tercapainya sasaran dan tujuan Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD yang optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang satu dengan yang lainnya sangat tidak dapat dipisahkan dan terdapat dalam satu sistem. Faktor-faktor tersebut adalah Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Organisasi, Disposisi Impemtor, dan Karakteristik agen pelaksana Pembendaharaan Keuangan Daerah. Untuk tercapainya Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD merupakan suatu Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah, perlu pemahaman yang lebih seksama. Salah satu hal yang juga penting adalah penetapan kebijakan yang menyangkut proses Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD.

Telah banyak kebijakan publik yang telah disampaikan kepada masyarakat, diantaranya kebijakan tentang pengembangan Sumberdaya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan peningkatan ilmu pengetahuan atau peningkatan sikap dan perilaku pegawai dalam suatu proses pemahaman untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, sedangkan pelatihan menekankan kepada suatu proses yang harus dilalui oleh pegawai dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah Terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD

Dari hasil penelitian ini bahwa Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X) di peroleh rata-rata tanggapan dari responden adlah 71,98% dengan kriteria baik dengan nilai jenjang 3, 5991 artinya bahwa Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah di Kabupaten Garut sudah baik, indikator terbesarnya adalah Karakter pegawai akan mempengaruhi terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Garut dengan persentasi 77,07% dengan kriteria baik dan nilai jenjang adalah 3,8533. Sedangkan indikator terendahnya adalah Intensitas Implementor terhadap Kebijakan yang rutin akan berdampak kepada manajemen pengelolaan keuangan SKPD di Kabupaten Garut dengan persentasi 64,80% dengan kriteria cukup baik dengan nilai jenjang adalah 3,2400.

Pengaruh Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD Terhadap Efektifitas Pengeluaran Anggaran SKPD Kabupaten Garut

Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Variabel Y) rata-rata dari jumlah komulatif tanggapan responden adalah 311,56 dengan persentasi 83,08% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjang adalah 4,1541 indikator terbesarnya Pengembangan rencana yang optimal akan berdampak kepada efektivitas pengeluaran anggaran SKPD di Kabupaten Garut dengan jumlah komulatif 356 dengan persentasi 94,93% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjangnya adalah 4,746. Sedangkan indikator terkecilnya adalah perencanaan sumber anggaran yang optimal tidak akan mempengaruhi terhadap efektivitas pengeluaran anggaran SKPD di Kabupaten Garut dengan jumlah komulatif 260 dengan persentasi 69,33% dengan kriteria baik dan nilai jenjang 3,4667.

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah Terhadap Efektifitas Pengeluaran Anggaran SKPD Kabupaten Garut

Efektifitas Pengeluaran Anggaran SKPD Kabupaten Garut (Variabel Z) rata-rata jawaban komulatif adalah 320,58 dengan persentasi 85,49% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjang adalah 4,2744. Adapun indikator tertingginya adalah Pengawasan Kegiatan akan mempengaruhi manajemen pengelolaan keuangan SKPD di Kabupaten Garut dengan jumlah komulatif 362 dengan persentasi 96,53% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjang 4,8267. Sedangkan indikator terendahnya adalah indikator pelaksanaan strategi yang baik dalam manajemen pengelolaan keuangan SKPD akan berpengaruh terhadap efektivitas pengeluaran anggaran SKPD di Kabupaten Garut dengan jumlah komulatif 291 dengan persentasi 77,60% dengan kriteria baik dan nilai jenjang 3,8800.

Dari Pengujian Hipotesis Penelitian Untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y dan Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 8,8474 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah memiliki berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z).

Pengaruh X terhadap Y Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Y, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 5,8246 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y).

Pengaruh X terhadap Z Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 4,9097 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z).

Pengaruh Y terhadap Z Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Y terhadap Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan

pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 6,0671 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z).

Dari hasil pengujian diketahui bahwa implementasi kebijakan pembendaharaan keuangan daerah memberikan pengaruh nyata terhadap manajemen pengelolaan keuangan SKPD dan efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut. Pengaruh ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 5,8246 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel (Y) dan (Z). Adapun besaran nilai koefisien determinasi (R_{YZX}^2) sebesar 0,8503. Hal ini menunjukkan bahwa 72,29% Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z) mampu dijelaskan oleh variabel Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X), sedangkan 27,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. .

Sedangkan dari Sub-sub Hipotesis Diketahui bahwa secara simultan Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah berpengaruh secara nyata terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut. Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah yang memberikan pengaruh nyata terhadap Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,5506.

Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 5,8246 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel (Y). Adapun besaran nilai koefisien determinasi (R_{YX}^2) sebesar 30,31%. Hal ini menunjukkan bahwa 69,69% variabel Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X). Sedangkan secara parsial untuk mencari pengaruh Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah terhadap Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 4,9097, selanjutnya didukung oleh hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 54,9097 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel (Z). Adapun besaran nilai koefisien determinasi (R_{ZX}^2) sebesar 0,3528. Hal ini menunjukkan bahwa 12,45% variabel Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z) mampu dijelaskan oleh variabel Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah S (X), sedangkan sisanya sebesar 87,55% dipengaruhi oleh variabel lain.

Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) terhadap Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z)”. diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,6034. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel (Y) terhadap (Z), maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 6,0671 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 diterima, sehingga variabel Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z). Pengaruh ini juga didukung oleh besaran nilai koefisien determinasi (R_{ZY}^2) sebesar 0,6034 yang menunjukkan bahwa Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD

Kabupaten Garut (Z) mampu dijelaskan sebesar 36,41% oleh variabel Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y), sedangkan sisanya sebesar 63,59% merupakan pengaruh variabel lain.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pembendaharaan keuangan daerah menunjukkan pada kriteria sangat baik. Hal ini diperlihatkan oleh rata-rata jawaban mengenai implementasi kebijakan pembendaharaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan SKPD dikategorikan sangat baik, berdasarkan rata-rata jawaban mengenai pengelolaan keuangan SKPD dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut menunjukkan pada kriteria baik. Hal ini diperlihatkan oleh rata-rata jawaban responden mengenai efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut.

Saran untuk penyempurnaan kebijakan adanya Sosialisasi, koordinasi dan adanya evaluasi kebijakan kaitannya dengan pengelolaan keuangan baik. Saran untuk penelitian lebih lanjut maka diharapkan pada masa mendatang berbagai pihak dapat meneliti lebih lanjut masalah-masalah di luar penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Hamsiah, A. (2018). Manajemen Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana BPJS Puskesmas. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 16(3), 165–256.
- Husin, H. (2019). Pengaruh PPKD Terhadap Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Politico*, 8(2), 1–14.
- James A F Stoner, & Edward Freeman. (2012). *Manajemen Jilid I*. PT Prahallindo.
- Jubaedah, E. (2011). Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(34), 288–299.
- Kamasan, W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39–46.
- Kristiani, K., Pelleng, F. A. O., & Manopo, W. S. (2017). Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Tombulang Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 5(003), 1–9. <https://doi.org/10.35797/Jab.5.003.2017.16564>.
- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan Dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren Bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X Di Kota Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.26714/Jsm.2.1.2019.76-79>
- Purnamasari, L. (2019). Analisis Pengeluaran Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Keuangan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 31–46.
- Rachmawati, D. W. (2018). Manajemen Pengelolaan Kinerja Keuangan Koperasi Sekolah Smk Swakarya Palembang. *Jurnal Profit*, 5(2), 111–118.
- Saifuddin, A. (2019). Perancangan Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Berbasis Anggaran Kinerja Pada Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Akrab Juara*, 4(4), 67–76. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Cv Alfabeta.
- Surbakti, C. C. (2011). Peramalan Sumber-Sumber Earmarking Penerimaan Daerah (Studi Kasus: Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Bandung). *Journal Of Regional And City*

Planning, 22(3), 211–226.

Tukunang, S. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 236–253.

Tyson, & Jackson. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gramedia.

Van, M., & Van, H. (1975). The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework. Departement Of Political Science Ohio State University. *Administration And Society*, 6(4), 447.

Yusup Hermawan. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–5.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang sumber-sumber penerimaan daerah.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah